



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Disampaikan dalam Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKP Tahun 2026

Eka Chandra Buana

Deputi Perencanaan Makro Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jakarta, 6 Mei 2025





AMANAT PERENCANAAN

PERENCANAAN MENJADI KUNCI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN



“...kami masih teguh dan berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan; tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan.

Saya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0 persen.

Saya yakin bahwa saya akan berhasil; jika tidak, kami tidak akan berani mengambil tindakan.

Marilah berbuat yang terbaik. Perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret....”



Sumber: Pidato Presiden Prabowo Subianto
dalam Musrenbangnas RPJM Nasional Tahun 2025-2029
(30 Desember 2024)

RKP TAHUN 2026: OPTIMIS, KONKRET, DAN TIDAK *BUSINESS AS USUAL*



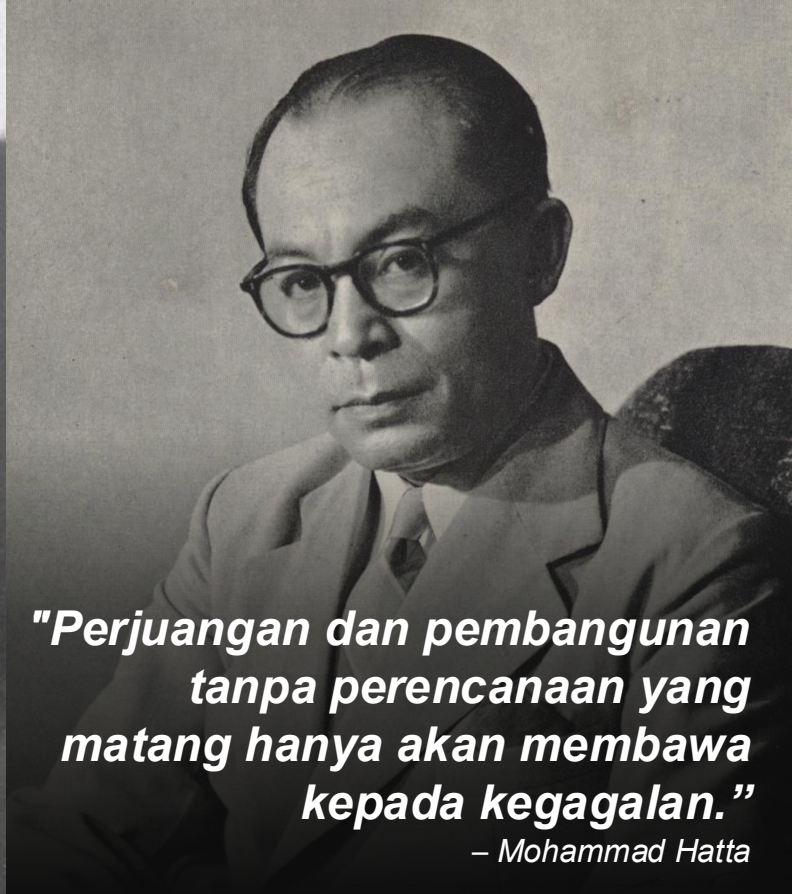
“Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it.”

– Alan Lakein



“A goal without plan is just a wish.”

– Antoine de Saint-Exupéry



“Perjuangan dan pembangunan tanpa perencanaan yang matang hanya akan membawa kepada kegagalan.”

– Mohammad Hatta

Arahan Strategis Bappenas dalam RKP 2026
ke Depan di Tengah Dunia yang Bergejolak

**Optimis, Konkret, dan
Tidak *Business as Usual***



EVALUASI PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2024

SASARAN PEMBANGUNAN MENUNJUKKAN CAPAIAN POSITIF, ADAPUN CAPAIAN INDIKATOR PANGAN DAN ENERGI MASIH PERLU DITINGKATKAN



EVALUASI TERKAIT KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI



Ketahanan Pangan

Pada tahun 2024, capaian produksi perikanan dan beras sebesar 80% dari target, adapun produksi jagung masih perlu ditingkatkan.



Produksi Perikanan
24,57 dari 30,85



Sumber: KKP (2024)



Ketersediaan Beras
38,88 dari 46,84



Sumber: BPS diolah Badan Pangan Nasional (2024)



Produksi Jagung
20,48 dari 35,27 juta ton



Sumber: KSA (ATAP) BPS 2024 (rilis Feb 2025)



Ketahanan Energi

Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target 19,50 persen pada tahun 2024...



14,68%
Porsi EBT
2024

Sumber: Kementerian ESDM, Des 2024

EVALUASI TERKAIT SASARAN PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS NASIONAL

Beberapa sasaran pembangunan seperti TPT dan Tingkat Kemiskinan berhasil menunjukkan capaian positif. Program pemerintah pusat dan daerah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

6,18
2015

4,91
Sept 2024

Sumber: BPS
(2025)

Program pemerintah yang mendukung penurunan TPT:
✓ Program Pra-Kerja



Penyediaan Lapangan Kerja (juta orang)

2,47
(2019)

4,79
(2024)

Sumber: BPS
(2025)



Total Kumulatif Peserta Pra-Kerja (Juta Orang)

5,93
(2020)

19,87
(2024)

Sumber: PraKerja
(2025)



Tingkat Kemiskinan (%)

11,13
2015

8,57
Sept 2024

Sumber: BPS
(2025)

Program pemerintah yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan:
✓ Program Keluarga Harapan
✓ Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Prevalensi Stunting (%)

29,0
(2015)

21,5
(2023)

Sumber: BPS
(2025)



Anggaran Perlindungan Sosial (Rp triliun)

276,2
(2015)

496,8
(2024)

Sumber: Kemenkeu
(2025)



Tumbuh
Indonesia bersama

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

KERANGKA EKONOMI MAKRO RKP TAHUN 2026

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL: RISIKO PERANG DAGANG AKIBAT KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AS



Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat

- Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan tarif resiprokal untuk negara yang surplus dagang terhadap AS.
- Beberapa negara seperti China melakukan retaliasi dengan meningkatkan tarif kepada AS.

Perang Dagang dan Disrupsi Rantai Pasok Global

Risiko Penurunan Permintaan dan Manufaktur Global

Perang Tarif China-AS

- China dan AS saling berbalas kebijakan peningkatan tarif hingga meningkat signifikan mencapai 125% dan 145%.
- Berisiko menyebabkan peningkatan tekanan inflasi pada dua negara dengan perekonomian terbesar.

Risiko Perlambatan Perekonomian Global

- Penurunan permintaan global berisiko memperparah tren perlambatan ekonomi global.

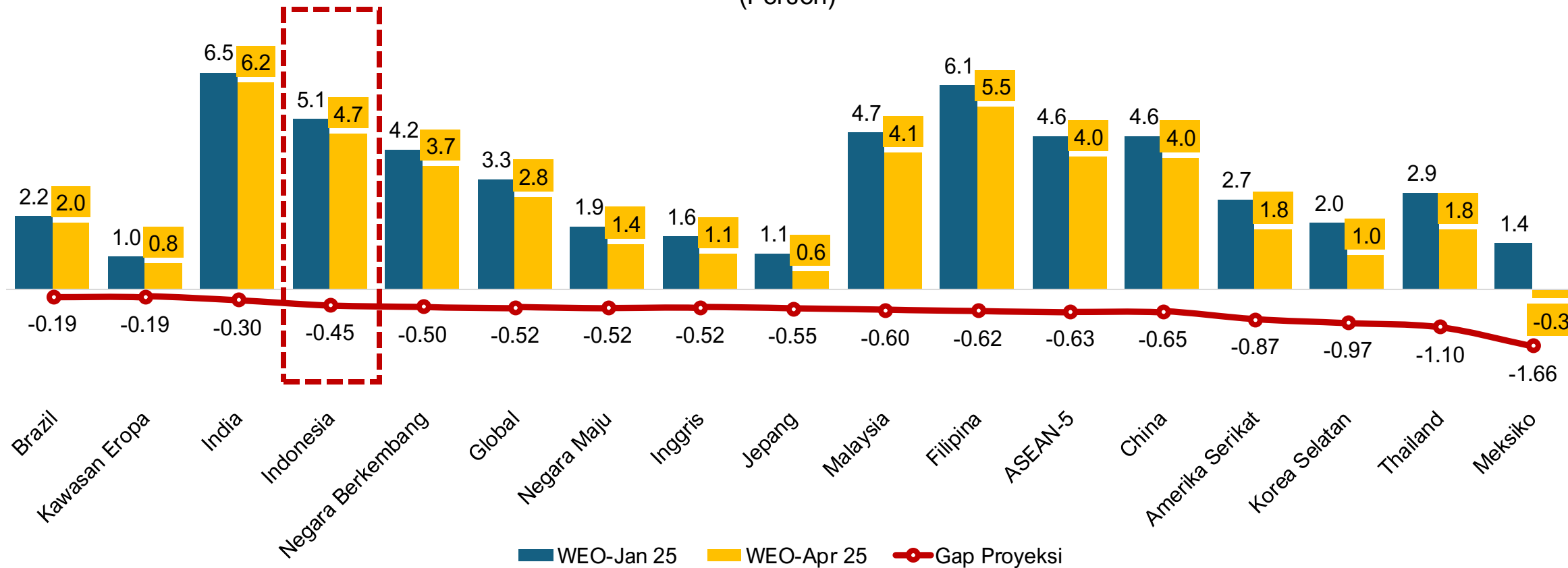
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)		2024	2025	2026
OECD, IEO Mar 2025	Global	3,2	3,1	3,0
	United States	2,8	2,2	1,6
	China	5,0	4,8	4,4
	Indonesia	5,0	4,9	5,0
IMF, WEO Apr 2025	Global	3,3	2,8	3,0
	United States	2,8	1,8	1,7
	China	5,0	4,0	4,0
	Indonesia	5,0	4,7	4,7

PENURUNAN *OUTLOOK* EKONOMI INDONESIA RELATIF TIDAK SEDALAM NEGARA LAIN



Perang dagang yang diakibatkan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan pada 2 April 2025 memicu penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Meskipun demikian, **penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tidak sedalam global dan beberapa negara lain** seperti China, Amerika Serikat, Korea Selatan, Meksiko, **Malaysia, Thailand, serta Negara ASEAN-5**. Ini **menunjukkan perekonomian Indonesia yang relatif kuat untuk menghadapi guncangan global** seperti perang dagang.

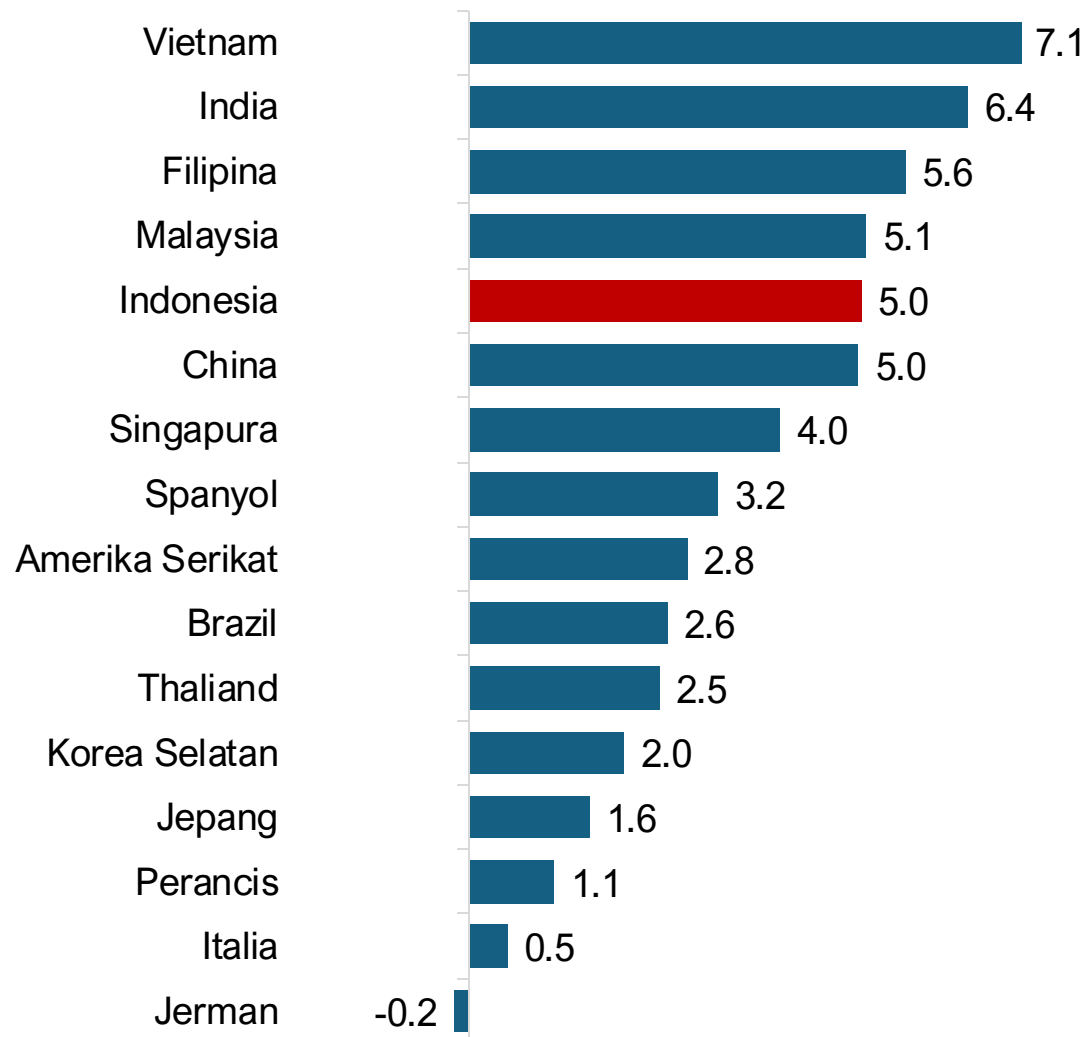
Gap Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Beberapa Negara WEO IMF
(Persen)



PERKEMBANGAN EKONOMI DOMESTIK: EKONOMI INDONESIA RELATIF TANGGUH DI TENGAH GEJOLAK GLOBAL



Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2024 (persen)



Sumber: BPS dan CEIC



Ekonomi Indonesia Tahun 2024 tumbuh tangguh sebesar 5,0% di tengah ketidakpastian global, relatif sama dengan pencapaian pra-pandemi. Beberapa indikator terkait konsumsi, investasi dan ekspor terus menunjukkan perbaikan pada awal tahun 2025.



Highlight Indikator Makroekonomi yang Menunjukkan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025

5,0%

(yoy)

Indeks Penjualan Ritel
Maret 2025

27,4%

(yoy)

Impor Barang Modal
Maret 2025

2,1%

(yoy)

Impor Bahan Baku
Maret 2025

3,2%

(yoy)

Ekspor
Maret 2025

157,1

(miliar USD)

Cadangan Devisa
Maret 2025

**"Neutral"
menjadi
"Overweight"**

Peringkat Indonesia
oleh UBS, April 2025

Sumber: BPS, Bank Indonesia, dan CEIC

PHK Massal Terjadi di PT Sritex yang Pailit, Ini Prosedur PHK Karyawan Menurut UU Cipta Kerja

Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah melaporkan bahwa kurator telah melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap hampir 10.000 karyawan

4 Maret 2025 | 19:04 WIB



Buruh dan karyawan keluar dari Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, 28

IHSG Ambruk ke 6.270 di Akhir Februari, Intip Rincian Perdagangan Hari Ini (28/2)

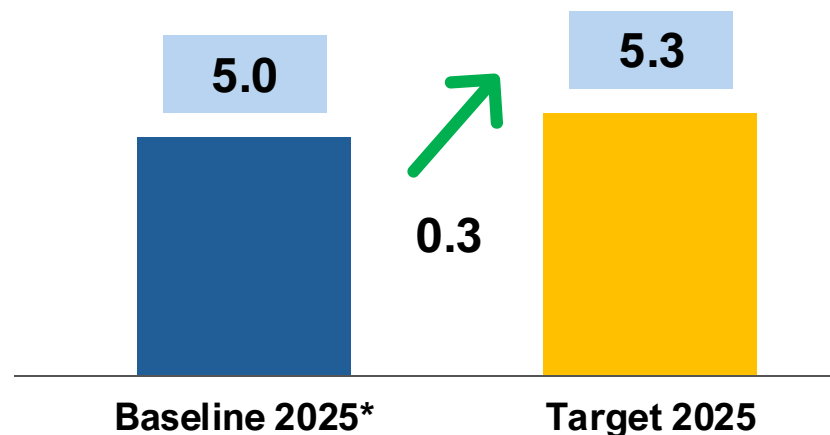
28 Februari 2025 | 21:48 WIB

f x s in o INDEX BERITA



ILUSTRASI: Suasana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/02/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin kembali ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan, Selasa (25/2/2025). IHSG Melemah 102,51 poin atau 2,41% ke level 6.587,09. Terdapat 135 saham mengukir 512 saham melemah dan 208 saham menguat. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,6 triliun dan 20,8 miliar saham yang dipertukarkan. KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pertumbuhan Ekonomi (persen)



*telah memperhitungkan dampak ketidakpastian global



Fenomena 2025



Daya beli melemah.



Risiko peningkatan pengangguran seiring tutupnya perusahaan padat karya seperti pada industri tekstil.



IHSG mencatatkan penurunan dan volatilitas signifikan.



Gejolak perekonomian global seiring kebijakan tarif resiprok AS.



Highlight Perkuatan Kebijakan 2025



Pemberian MBG (penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,5 juta)



Kredit investasi padat karya



3 Juta Rumah & 80 Ribu Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih



Kebijakan Fiskal dan Moneter yang *Pro-Growth* dan *Pro-Stability*



Deregulasi peraturan pusat dan daerah untuk mempercepat perijinan



Perkuatan Kerjasama Internasional: **BRICS**, Indonesia-EU (CEPA), dan OECD



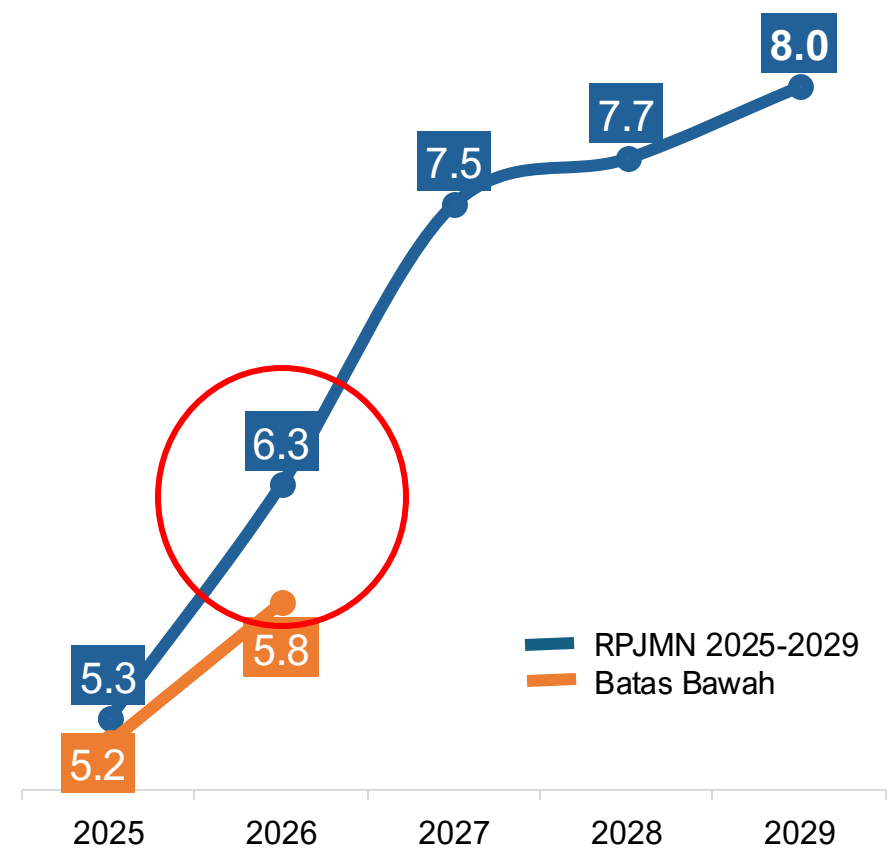
Optimalisasi investasi melalui **Danantara**

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2026



Peningkatan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 cukup tinggi. Mengingat berbagai ketidakpastian global, terdapat risiko ke bawah (*downside risk*).

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025-2029
(Persen)



Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dari sisi pengeluaran didorong oleh **konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor**. Serta dari sisi lapangan usaha utamanya didorong oleh **industri pengolahan, penyediaan akmamin, infokom, dan pertanian**.

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2026

5.8 - 6,3
(persen)

Sisi Produksi

Sisi Pengeluaran

	Pertumbuhan	Pertumbuhan	
Pertanian	2,3 – 2,4	5,5 – 5,8	Konsumsi Masyarakat
Pertambangan	5,7 – 5,9		
Industri Pengolahan	5,9 – 6,4	6,8 – 7,0	Konsumsi Pemerintah
Konstruksi	7,8 – 7,9	6,2 – 7,2	PMTB/Investasi
Penyediaan Akmamin	9,7 – 9,8	7,1 – 7,2	Ekspor Barang dan Jasa
Transportasi dan Pergudangan	9,6 – 10,0	7,3 – 7,5	Impor Barang dan Jasa
Informasi dan Komunikasi	8,2 – 8,8		

STABILITAS EKSTERNAL DIPERKUAT MELALUI PERBAIKAN KINERJA NERACA PEMBAYARAN INDONESIA



POSTUR NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (Miliar USD)

KOMPONEN	TAHUN 2026
Transaksi Berjalan (Persen PDB)	(14,52) – (17,02) (0,90) – (1,04)
Barang	33,13 – 34,81
Jasa-jasa	(18,54) – (19,23)
Pendapatan Primer	(38,25) – (39,01)
Pendapatan Sekunder	7,46 – 8,10
Transaksi Modal dan Finansial	21,45 – 24,02
Investasi Langsung	17,73 – 20,19
Investasi Portofolio	12,40 – 12,73
Investasi Lainnya	(8,76) – (8,95)
Neraca Keseluruhan	5,69 – 5,75
Cadangan Devisa dalam bulan impor	171,01 – 171,42 6,2 – 6,4

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2026

Highlights

Defisit transaksi berjalan atau *Saving-Investment (S-I)* Gap tetap dijaga rendah untuk menjaga stabilitas eksternal tetap kuat



Neraca perdagangan barang ditargetkan surplus yang didorong oleh hilirisasi yang menghasilkan peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi serta produk berteknologi menengah tinggi.



Defisit neraca jasa-jasa ditargetkan menurun, didorong oleh peningkatan surplus jasa perjalanan dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan peningkatan belanja wisman (ASPA).



Surplus neraca pendapatan sekunder ditargetkan meningkat didorong oleh peningkatan transfer remitansi PMI melalui peningkatan keterampilan dan perluasan lokasi penempatan PMI.

Transaksi modal dan finansial diperkirakan akan surplus sejalan dengan perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif



Investasi langsung ditargetkan mencatat surplus tinggi seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan proyek-proyek prioritas nasional.



Investasi portfolio ditargetkan tetap surplus, didorong oleh peningkatan iklim pasar keuangan Indonesia yang semakin menarik seperti suku bunga dan imbal hasil (*yield*) yang kompetitif.

Dengan demikian, neraca keseluruhan ditargetkan untuk mencatatkan surplus pada tahun 2026, dengan cadangan devisa sekitar USD 171,01 – 171,42 miliar yang mampu membiayai 6,2 – 6,4 bulan impor.



RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2026



RPJP Nasional 2025 - 2045

UU No. 59 Tahun 2024



RPJM Nasional 2025-2029

Perpres No. 12 Tahun 2025

RPJMN 2025-2029: RPJPN Tahap I yang telah diintegrasikan dengan **Visi dan Misi Presiden (Asta Cita)** menjadi **8 Prioritas Nasional**.

“Trisula Pembangunan” dalam RPJMN:

3 pilar utama pembangunan nasional

-  1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
-  2. Penurunan Kemiskinan
-  3. Peningkatan Kualitas SDM



Direktif Presiden

- Digitalisasi Pendidikan
- Sekolah Rakyat
- Pengelolaan Sampah
- Pengentasan Kemiskinan
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Integrasi

RKP Tahun 2026

Tema RKP 2026
“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”



Gambaran Muatan RKP 2026:

- Arah dan Intervensi Kebijakan
 - Strategi Intervensi Kewilayahan
 - Manajemen Risiko dan Tata Kelola Pembangunan
- yang akan diacu oleh seluruh K/L/D

TEMA, PRIORITAS NASIONAL, DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026



Tema dan Prioritas Nasional tersebut direfleksikan dalam sasaran utama dalam RKP Tahun 2026 yang didasarkan pada “Trisula” Pembangunan

Sasaran “Trisula” Pembangunan Tahun 2026

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8* — 6,3
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
<i>GNI Per Capita</i>	5.870
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67

Penurunan Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96
Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Rasio Gini	0,377 – 0,380

Sumber Daya Manusia Berkualitas

Indeks Modal Manusia	0,57
----------------------	------

Prioritas Nasional (PN)



*) Merupakan angka kesepakatan Ratas 26 Maret 2025

Penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri dari **5 direktif presiden** dan program-program lain yang kongkrit, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh **Prioritas Nasional**.

Kedaulatan Pangan Dan Energi



Pangan

- Optimalisasi BULOG
- Pelaksanaan lumbung pangan (*food estate*)



Energi

- Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel
- Energi terbarukan



Air

- Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir



Pengelolaan Sampah*

PN 2

Ekonomi yang Produktif dan Inklusif



Pendidikan dan Kesehatan

- Ekosistem Makan Bergizi Gratis
- Percepatan renovasi sekolah
- Sekolah unggulan
- Cek kesehatan
- Percepatan rumah sakit daerah
- **Digitalisasi Pendidikan***
- **Sekolah Rakyat***



Deregulasi dan Kepastian Hukum

- Reformasi Birokrasi
- Kemudahan berbisnis
- Ketertarikan investasi



Pertahanan Semesta

- Komponen cadangan
- Pemenuhan alutsista
- Penguatan kemampuan teritorial



Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

- Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia
- Optimalisasi potensi Danantara



Adopsi Teknologi dan Inovasi

- Transformasi digital
- Riset dan Inovasi



Percepatan Pengentasan Kemiskinan*

- Data tunggal kemiskinan
- Digitalisasi bantuan
- 3 juta rumah
- **Koperasi desa/kelurahan merah putih***



Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi

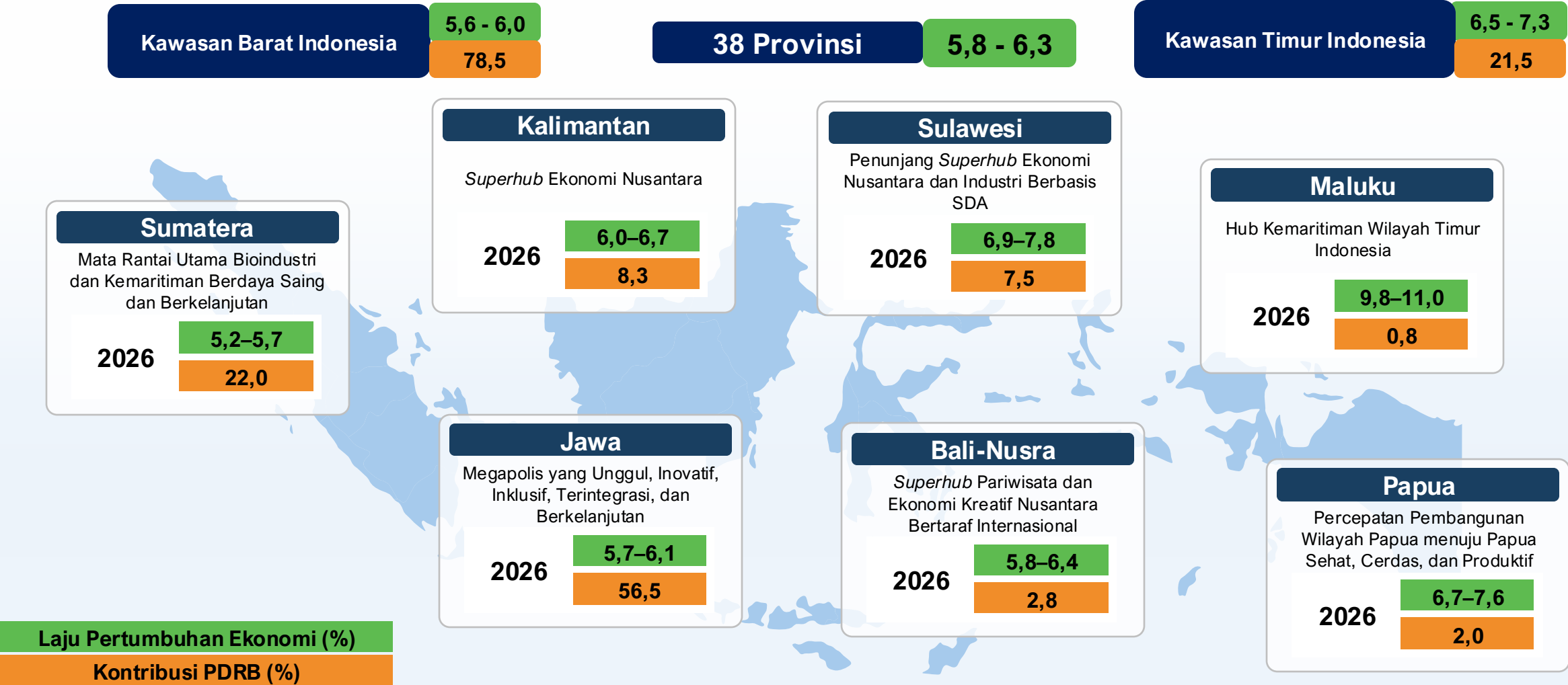
PN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

SASARAN DAN TEMA PEMBANGUNAN WILAYAH RKP TAHUN 2026: PERLU DIDUKUNG OLEH DAERAH



Pembangunan Wilayah dalam RKP Tahun 2026 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningkatan kontribusi PDRB dari Kawasan Timur Indonesia. Fokus tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

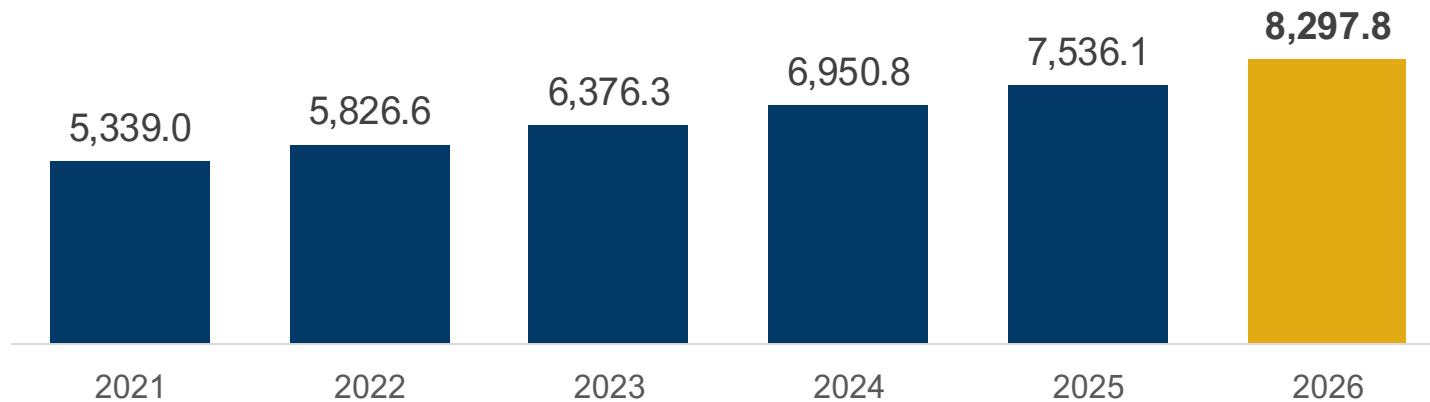
Sasaran dan Tema Pembangunan Wilayah RKP Tahun 2026



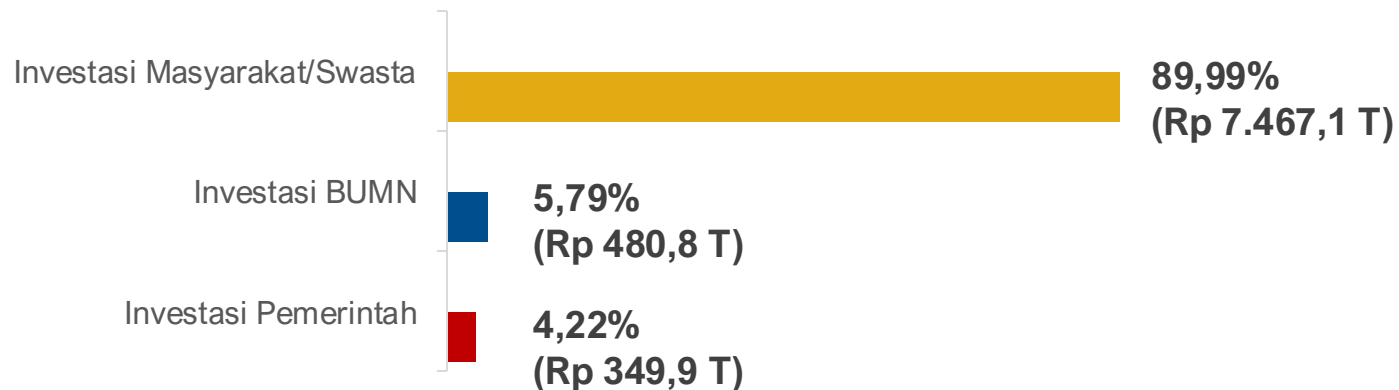
INVESTASI TAHUN 2026: MENDORONG KETERLIBATAN BUMN DAN SWASTA DALAM INVESTASI PROYEK-PROYEK STRATEGIS



Total Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)



Kontribusi terhadap Kebutuhan Investasi Tahun 2026 (Rp Triliun)



Highlights

- ✓ Dengan terbatasnya investasi pemerintah, investasi BUMN dan swasta menjadi penting.
- ✓ Kebijakan investasi diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif guna menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi
 - Revisi PP 5/2021 untuk kemudahan berusaha.
 - Revisi Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- ✓ Kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang agresif terhadap mitra utama seperti China, Kanada, dan Meksiko menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi

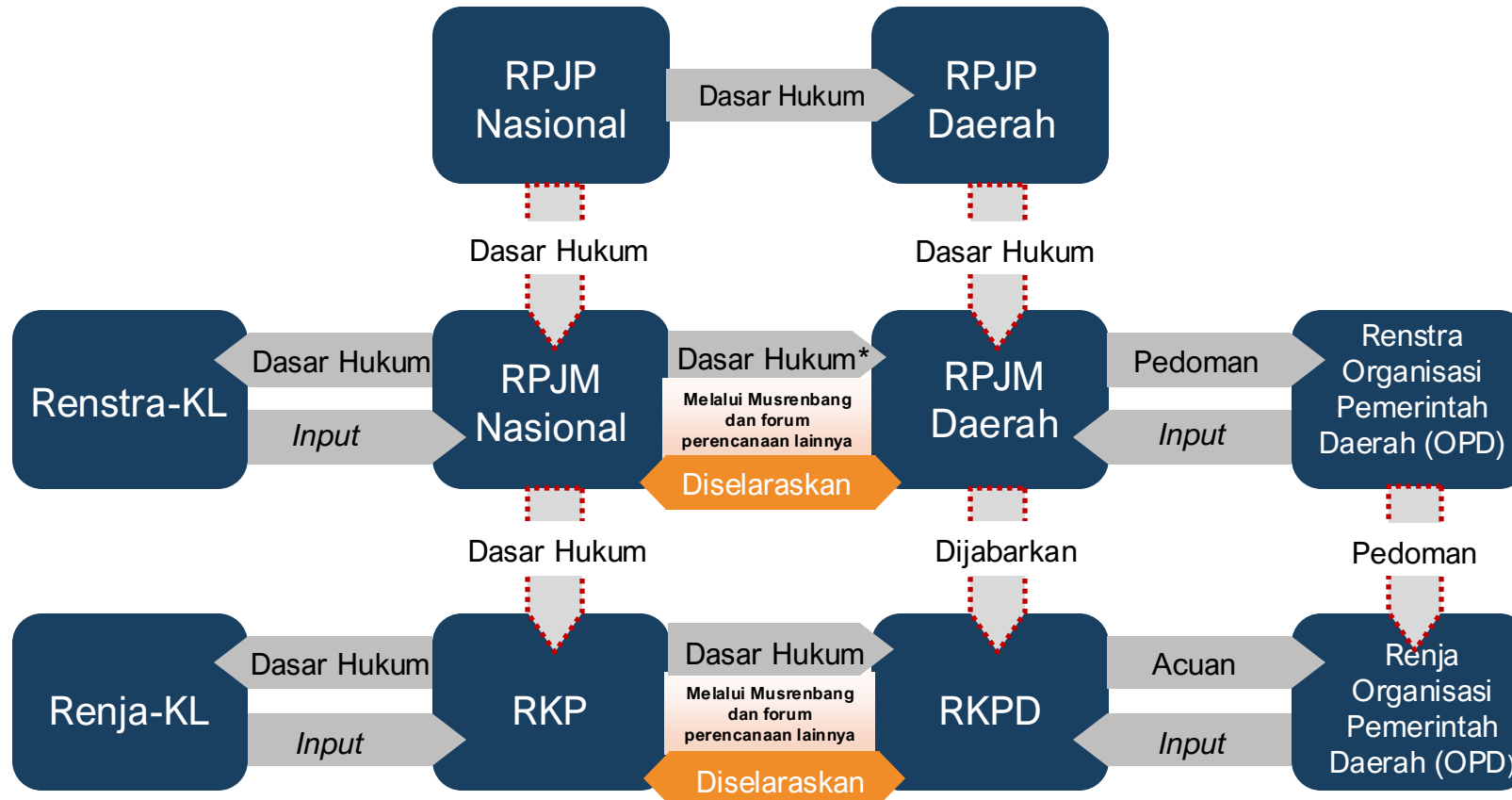


KOLABORASI ANTAR PIHAK DALAM PERENCANAAN

PENTINGNYA MENJAGA KESINAMBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Diperlukan komitmen pencapaian sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam:



Program



Kegiatan



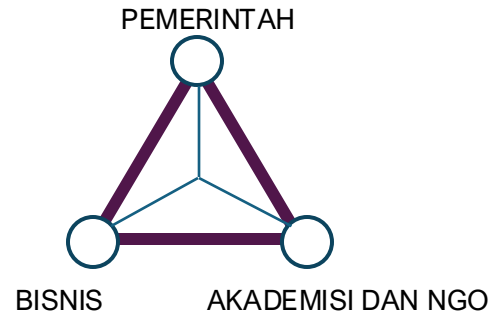
Alokasi anggaran

pada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah

*)**Catatan:** Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU No. 59 Tahun 2024, Penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025—2045 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

TRIPLE HELIX PARTNERSHIP SEBAGAI STRATEGI IMPLEMENTASI PRIORITAS RKP TAHUN 2026



ILUSTRASI MODEL KOLABORASI TRIPLE HELIX PARTNERSHIP

Peran masing-masing aktor *helix* meliputi:

1. Akademisi dan NGO, sebagai konseptor

Akademisi dan NGO berperan dalam **memberikan masukan berbasis kajian ilmiah, mengusulkan alternatif kebijakan**, serta **mengawasi** jalannya pemerintahan agar kebijakan dan program pembangunan tetap akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kepentingan publik.

2. Bisnis, sebagai fasilitator

Pelaku bisnis berperan dalam **mengimplementasikan proses bisnis, menghasilkan nilai tambah**, serta **memfasilitasi inovasi dan kolaborasi** yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

3. Pemerintah, sebagai regulator

Pemerintah bertugas **mengatur arah kebijakan, menyusun regulasi**, serta **mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan** lintas sektor dan aktor, sekaligus memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Contoh: Kemitraan Triple Helix untuk Pengembangan Sapi di Bali

- Pengembangan populasi sapi Bali hingga 1 juta ekor
- Pengembangan studi teknologi peternakan dan pascapanen
- Membangun kemitraan yang lebih luas: keterlibatan pelaku usaha
- Kabupaten Buleleng menjadi Pusat Pengembangan Ternak Ruminansia



Tujuan:

Revitalisasi sistem pangan yang andal dan berkelanjutan dalam aspek konsumsi dan produksi.

Kemitraan Triple Helix:

- **Pemerintah:** Bappenas dan Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng
- **Akademisi/RnD:** Universitas Pendidikan Ganesha, Central Queensland University (CQU)
- **Swasta/Investor:** Trade and Investment Queensland, Pemerintah Queensland

Ruang Lingkup Kemitraan:

- Pembiakan dan pemberian pakan
- Pengolahan produk: Rumah potong hewan dan industri pengolahan daging sapi
- Pendidikan, penelitian, dan teknologi



Dedi Mulyadi dan Komitmen Jawa Barat dalam Mendorong Investasi: Solusi Cepat dalam 20 Menit

Gubernur Anwar Hafid Pastikan Beasiswa Kuliah Gratis Tanpa Syarat

March 13, 2025

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa tanpa syarat khusus. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (12/3/2025).

 **ANTARA** KUALITAS BERITA INDONESIA  **HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO**

ANTARA > Ekonomi > Bisnis > Pemprov Kalsel kembali kembangkan teknologi padi a

Pemprov Kalsel kembali kembangkan teknologi padi apung

Selasa, 9 Januari 2024 23:12 WIB waktu baca 2 menit

Inovasi kebijakan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus mendorong tercapainya sasaran-sasaran pembangunan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi dalam merumuskan intervensi kebijakan melalui:

- 1 Optimalisasi skema baru non-APBN untuk pembiayaan kegiatan
- 2 Penciptaan kebijakan yang solutif untuk memastikan pemerataan pembangunan

RKP 2026 merupakan panduan strategis Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap Rupiah anggaran mendorong produktivitas, kedaulatan nasional, dan pemerataan kesejahteraan



PENUTUP

1

RKP 2026 perlu bantuan, masukan, dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder* termasuk dari Akademisi, Asosiasi Pengusaha, Organisasi Profesi, serta Masyarakat Sipil

2

Memastikan sasaran dan prioritas Pembangunan **RKP 2026 menjadi acuan** dalam penyusunan **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)** Kementerian/Lembaga dan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

3

Sinergi melalui *Triple Helix* Pembangunan sangat penting dan diperlukan guna mendukung pencapaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan dalam RKP 2026

4

RKP 2026 adalah dokumen bersama, yang penyusunannya hingga pelaksanaannya melibatkan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil dan pemerintah. Oleh karena itu, **RKP 2026 diharapkan menjadi rujukan utama** dalam pengambilan keputusan—baik di bidang bisnis, riset, maupun kebijakan strategis lainnya—oleh seluruh pemangku kepentingan.



Tumbuh
Indonesia bersama

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

TERIMA KASIH

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)